

Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia

Singgih Afifa Putra^{a1*}, Santia Gardenia Widyaswari^a, Al Azhar^a, Rr. Dhita Puspitasari^a, Dhelma Ventia Parmino^a

^a Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK), Jl. Diklat No. 30, Pacellekang, Pattalassang, Gowa, Sulawesi Selatan, 92171

¹ singgih.afifa@kemdikbud.go.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRAK / ABSTRACT

Article history

Received:
February 27, 2020

Revised:
April 28, 2020

Accepted:
June, 17, 2020

Kata Kunci:

Pelatihan online, perubahan perilaku, evaluasi pasca pelatihan

Keywords:

Online training, behavioral change, post-training assessment

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk guru kejuruan telah diimplementasikan dalam beberapa program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dengan verifikasi bukti kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan berpedoman kepada panduan mutu BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) merupakan suatu pendekatan pelatihan yang menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap (*knowledge, skill, and attitude*) untuk memenuhi suatu standar kompetensi. Paper ini merupakan kajian terhadap pengembangan kapasitas SDM Maritim (i.e. tenaga pendidik) sebagai dampak hasil pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan oleh Kemdikbud RI di Indonesia. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan pembahasan literature yang relevan. Tahap awal implementasi PBK pada program pelatihan bidang kemaritiman menunjukkan kelulusan pelatihan dan rekomendasi kompeten bagi semua peserta.

Implementation of competency-based training (CBT) for vocational high school teachers has been done through several priority programs of Ministry of Education and Culture of Indonesia (Kemendikbud RI) during 2016 and 2017 such as Guru Pembelajar (professional teacher sustainable development) and Keahlian Ganda (teacher with dual expertise), with competence proof from skill competency assessment (SCA) organized by Lembaga Sertifikasi Profesi (Professional Certification Institution). CBT can be interpreted as a training approach that emphasizes the development of skills, knowledge, and attitude to meet a standard of competency. This article is a review related to the capacity building of Maritime Human Resource in terms of competency-based education and training conducted by the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Data was analysed with statistical descriptive. The initial stage of CBT development in the field of maritime in the training program was proven by the graduation of training and competent recommendation for all teacher participants.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenjang pendidikan formal yang memiliki potensi strategis dalam memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia akan SDM yang memiliki daya saing sekaligus mencapai tujuan pembangunan nasional (Slamet, 2011). Upaya pemerintah dalam hal pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia salah satunya adalah dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Setidaknya, program ini melibatkan 12 Kementerian dan 34 Pemerintah Provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini menempatkan prioritas revitalisasi SMK pada enam isu strategis (Direktorat PSMK, 2017) yaitu penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum; inovasi pembelajaran; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; dan kemitraan sekolah dengan dunia usaha/ dunia industri atau DU/DI (Direktorat PSMK, 2017). Sinergi dengan pihak industri sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu SMK (Arifin, 2012; Wibowo, 2016). Pendampingan dan program pelatihan dilakukan pada bidang yang relevan dengan kompetensi masing-masing lembaga pelatihan.

Jalur pendidikan vokasi/kejuruan (i.e. Politeknik, SMK) merupakan konsep pendidikan dengan orientasi karir/pekerjaan (Mohamad dkk., 2012; Sutjipto, 2019), dimana pendidikan ini dikembangkan untuk menyiapkan dan/atau meningkatkan kualifikasi SDM sebagai tenaga kerja terlatih memasuki dunia kerja yang menguntungkan baginya (Dilemunthe dkk., 2016). Konsep utuh pendidikan kejuruan adalah pengembangan kompetensi, termasuk didalamnya kompetensi individu, kompetensi kerja, pelatihan efektif, peningkatan keterampilan, dan kelangsungan kompetensi (*competency performance*). Oleh karena itu, guru dituntut mendesain pendekatan multi-pengajaran dalam pengembangan peserta didik untuk setiap kompetensi keahlian (Mohamad dkk., 2012).

Revitalisasi pendidikan kejuruan melalui program pelatihan guru SMK dianggap langkah yang tepat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMK (Yoto, 2015; Maryati dkk., 2016, Irniyah dkk., 2016), sehingga *output* SMK nanti dapat bersaing di DU/DI dan juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Kualitas dan efisiensi pendidikan juga tergantung dari kualitas dan kinerja guru yang profesional (Kartowagiran, 2011). Tujuan dari sistem pendidikan ini di samping menyiapkan pengetahuan kepada peserta didik, juga mengajarkan mereka "*learning how to learn*" untuk mengorganisasi proses berpikir sehingga dapat menyelesaikan masalah yang berbeda dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan pada tantangan masa depan (Maryati dkk., 2016). Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan teknik supervisi, menumbuhkan budaya pembelajaran, dan kegiatan pelatihan (Subandi, 2013). Suatu pelatihan dan pembimbingan yang efektif dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan guru semaksimal mungkin (Andrini, 2010; Mulyawan, 2012). Tulisan tentang pelatihan dan peningkatan kompetensi guru di Indonesia sudah banyak dilakukan (e.g., Dwijayanti dkk, 2017; Ulfa, 2018; Harlina dan Bachri, 2019), namun kajian terhadap pengembangan profesionalitas dan keterampilan teknis guru SMK masih sulit ditemukan. Sehingga, tulisan ini mencoba untuk mengkaji pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan guru-guru SMK di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian pustaka/studi literatur. Kajian dilakukan pada Bulan Januari – Maret 2018 terhadap laporan dan evaluasi kediklatan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian studi pustaka atau kajian literatur memerlukan tahapan antara lain menyusun daftar bacaan, membaca, dan menganalisis literatur. Literatur yang digunakan dalam kajian ini adalah literature primer (e.g. hasil penelitian, jurnal ilmiah), dan literatur sekunder (e.g. buku, artikel daring). Metode studi pustaka telah banyak digunakan dalam kajian-kajian bidang pendidikan (Sudarya, 2007; Sina, 2014; Habsy, 2017), maupun kajian-kajian lainnya (Muharam, 1999; Mufida dkk., 2015; Anita, 2016). Data yang dihasilkan kemudian dianalisis dan ditampilkan deskriptif menggunakan grafis dan diagram.

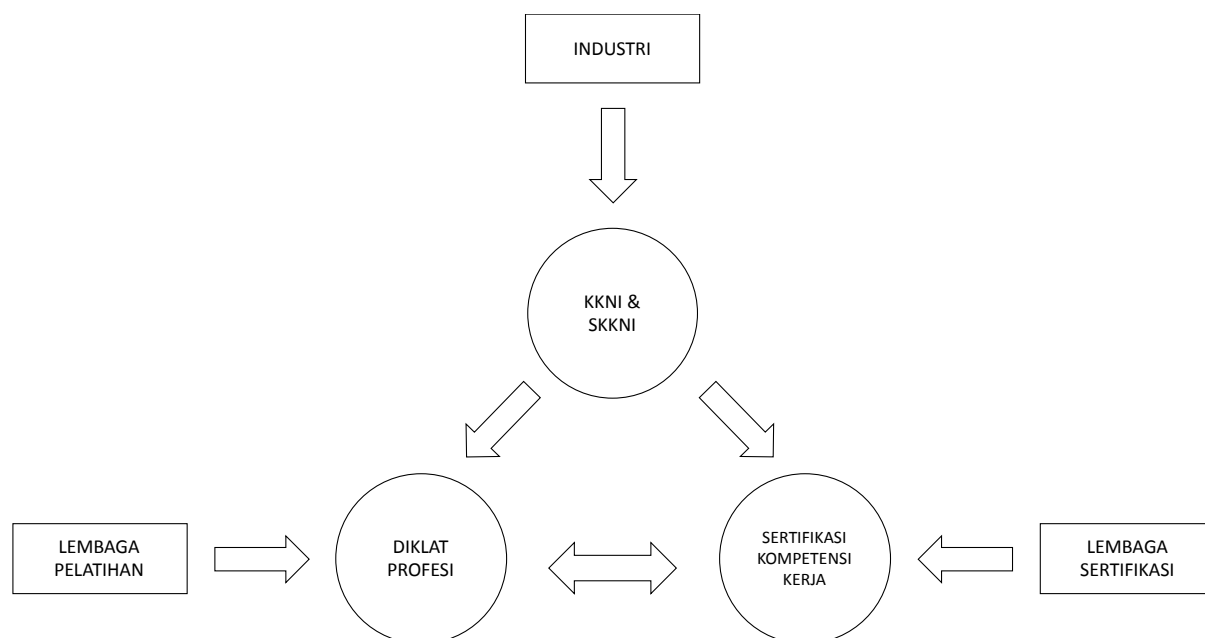
Hasil dan Pembahasan

Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) atau *competence-based training* (CBT) didefinisikan sebagai suatu pendekatan pelatihan yang menekankan pada apa yang sebenarnya dapat dilakukan seseorang sebagai hasil dari pelatihan tersebut (ANTA, 2003). Robinson & Misko (2003) mengartikan CBT sebagai pelatihan yang mana pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap adalah komponen yang harus didapatkan untuk mencapai

standar kompetensi. Gagasan utama penerapan CBT dalam pelatihan dan pendidikan kejuruan atau *vocational education and training* (VET) pada banyak negara adalah untuk beralih dari pelatihan-pelatihan sebelumnya menjadi bagaimana penguasaan peserta terhadap suatu standar kompetensi tertentu. Kedua, adalah sebuah pergeseran penyaji atau pendekatan melalui pendidik yang menjadi sistem pelatihan yang berbasis dunia industri (Peter, 2014).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014, Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi salah satunya adalah dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang terregistrasi atau terakreditasi nasional. Lembaga pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan SMK untuk bidang kemaritiman sesuai dengan Permendikbud No. 018 Tahun 2015 dilaksanakan oleh LPPPTK KPTK. Bidang lainnya yang sesuai dengan spektrum SMK dikelola oleh unit pelaksana lain yang serupa yaitu PPPPTK (e.g., PPPPTK Pertanian, PPPPTK BOE, PPPPTK BMTI, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, PPPPTK Seni dan Budaya, PPPPTK BBL).

LPPPTK KPTK maupun PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Konsep pelaksanaan program pengembangan SDM Maritim berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan tersebut adalah mengacu kepada tiga pilar utama pengembangan SDM berbasis kompetensi (Kemenaker, 2017) yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah maupun swasta, dan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP (lihat Gambar 1). KKNi dan SKKNI merupakan acuan utama pengembangan model pelatihan di LPPPTK KPTK dan pengembangan skema sertifikasi keahlian di LSP LPPPTK KPTK. Tujuan adopsi KKNi/SKKNI sebagai acuan adalah sinergi sesuai kebutuhan dari dunia industri terhadap *output* pelatihan kompetensi guru kejuruan yang mana akan berdampak terhadap kompetensi profesional lulusan peserta didik di SMK.



Gambar 1. Tiga pilar utama pengembangan SDM berbasis kompetensi (Sumber: Kemenaker, 2017)

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Upaya berkelanjutan peningkatan kompetensi guru oleh pemerintah pusat (i.e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) adalah pelaksanaan program Guru Pembelajar (mulai Tahun 2017 berganti nama menjadi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Peningkatan kompetensi guru terkait dengan profesionalismenya harus dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, untuk kenaikan karir dan kepangkatan, guru harus melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Program PKB adalah pengembangan

kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, memperluas dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu (Hartiningtyas dkk., 2016).

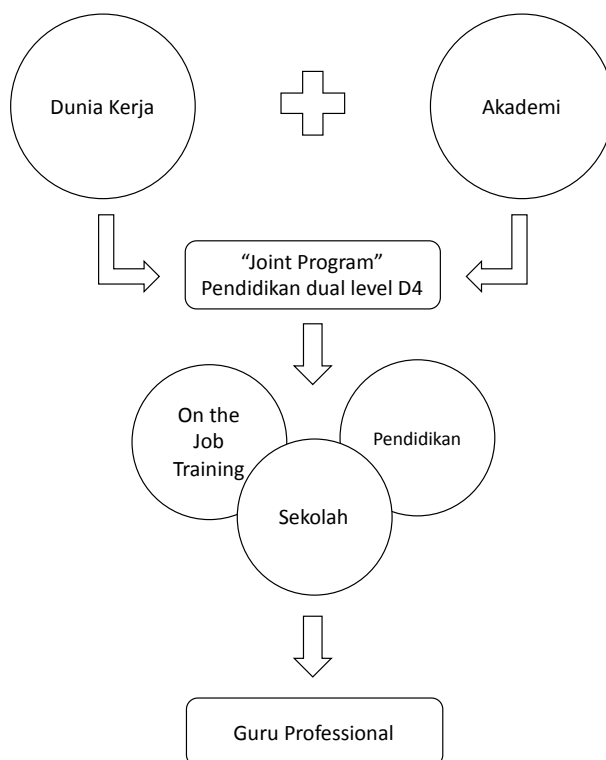
Program PKB dikembangkan berdasarkan peta kompetensi guru yang dapat dilihat dari hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan Uji Kompetensi Guru (UKG) serta didukung dengan hasil evaluasi diri (Ditjen GTK, 2016). Pemetaan hasil UKG berdasarkan analisis dan kelayakan butir soal dan analisis pengembangan model pelatihan oleh pakar kompetensi pedagogik, profesional, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan menunjukkan bahwa model pelatihan yang direkomendasikan dan dapat dilaksanakan sebagai alternatif pemilihan Pendidikan dan Pelatihan bagi Guru Kejuruan di SMK (Pawellangi dkk., 2016, Pawellangi, 2017). Guru yang kompetensinya masih di bawah Kriteria Capaian Minimal (KCM) akan mengikuti peningkatan kompetensi yang diorientasikan untuk mencapai standar kompetensi minimal. Moda pembelajaran program PKB terbagi ke dalam 3 (tiga) moda, yaitu (1) Tatap Muka; (2) Daring (*full online learning*); dan (3) Daring kombinasi, antara daring dan tatap muka (*blended learning*) (Ditjen GTK, 2016).

Program PKB adalah salah satu contoh program pelatihan bagi guru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keberlanjutan program ini nantinya dapat memfasilitasi pembelajaran gratis secara daring (dalam jaringan) bagi seluruh guru baik kejuruan maupun non kejuruan di Indonesia (i.e. *massive open online course*). Menurut Sumarso (2016), program PKB memiliki permasalahan diantaranya adalah belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, dan tidak semua guru menguasai teknologi pembelajaran yang diterapkan pada program PKB, khususnya peserta dengan moda pembelajaran daring. Sejak dimulai program Guru Pembelajar pada Tahun 2016, moda pembelajaran tatap muka atau daring kombinasi biasa diterapkan pada peserta dimana daerahnya tidak/kurang mendukung akses jaringan internet. Tahun 2017 Program PKB bagi guru kejuruan mulai dilaksanakan bersama dengan asesmen kompetensi atau uji kompetensi keahlian (UKK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah dibentuk dan berkoordinasi dengan UPT Kemendikbud.

Program Keahlian Ganda (Program Sertifikasi Profesi dan Sertifikasi Keahlian bagi Guru SMA/SMK)

Solusi alternatif pemenuhan kekurangan guru kejuruan di Indonesia antara lain adalah penambahan formasi guru kejuruan, alih fungsi guru adaptif menjadi guru produktif, *outsourcing* melalui rekognisi pengalaman lampau (RPL) bagi tenaga ahli dari industri, atau alih tugas/mutasi. Menurut Ditjen GTK (2017) persentase jumlah guru di SMK di Indonesia adalah 22% guru produktif dan 78% guru adaptif. Melalui program Keahlian Ganda (sebelumnya dikenal Program Alih Fungsi) peserta yang dinyatakan lulus dan kompeten dapat memenuhi kekurangan kebutuhan guru produktif di SMK khususnya untuk 4 bidang prioritas yaitu kemaritiman, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, serta teknologi dan rekayasa. Program keahlian ganda bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru SMK dan SMA yang mengampu mata pelajaran adaptif untuk memperoleh kompetensi keahlian tambahan dan mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK.

Pencapaian tujuan program keahlian ganda dilaksanakan oleh tiga *stakeholder* utama yaitu, Lembaga Pelatihan (LPPPTK KPTK atau PPPPTK), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan DU/DI (perhatikan Gambar 2). LPPPTK KPTK / PPPPTK adalah lembaga pelatihan yang ditugasi untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi (sesuai kebutuhan DU/DI) dan menjamin tercapainya kompetensi peserta program dalam UKK yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. LPTK dalam hal ini bertindak sebagai lembaga pendidikan yang akan melaksanakan sertifikasi profesi melalui program pendidikan dan pelatihan guru (PLPG) atau program pelatihan guru dalam jabatan (PPG-J) bagi peserta program keahlian ganda yang dinyatakan lulus pelatihan dan kompeten. Sedangkan DU/DI dalam hal ini menyediakan informasi kompetensi yang dibutuhkan, tempat magang dan praktik kerja untuk *supporting* pelatihan berbasis kompetensi.



Gambar 2. Model kerjasama antara LPPPTK/PPPPTK, LPTK, dan Dunia Industri (Sumber: Ditjen GTK, 2017)

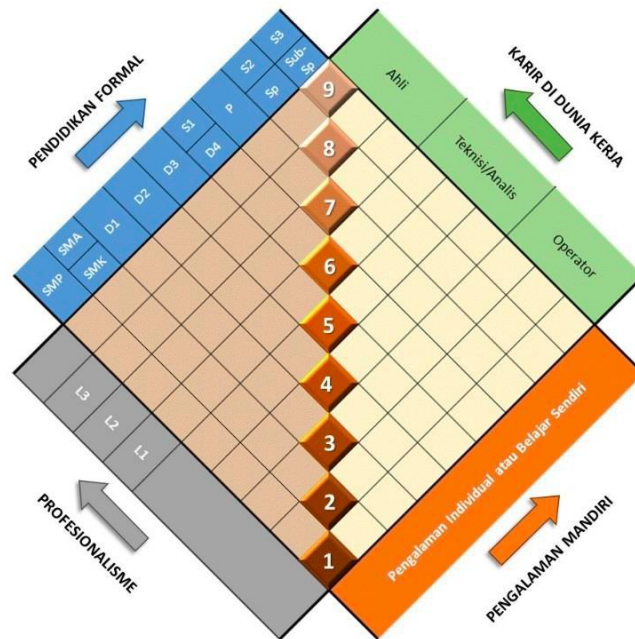
Lembaga Sertifikasi Profesi

Pengembangan standar kompetensi guru SMK/MAK memiliki implikasi terhadap kebijakan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (e.g. Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Makassar, dan seterusnya) dan juga Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Menurut LPTK, standar kompetensi guru SMK/MAK merupakan *exit criteria*, artinya setiap lulusan dari program pendidikan guru pada LPTK harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, proses pembelajaran, muatan kurikulum, dan penilaian yang ada di LPTK perlu diselaraskan dengan standar yang ada. Bagi pihak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, standar ini merupakan *entry criteria* yang dijadikan acuan dalam melakukan rekrutmen guru, materi pelatihan, dan uji kompetensi guru (BSNP, 2017). Menurut Ditjen Belmawa (2017) pencapaian jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dapat dilakukan melalui berbagai tapak jalan: pendidikan formal, pengembangan karier di dunia kerja, pengalaman individu atau belajar mandiri, proses pelatihan mandiri/terstruktur untuk meningkatkan profesionalitas atau tapak jalan lainnya (lihat Gambar 3).

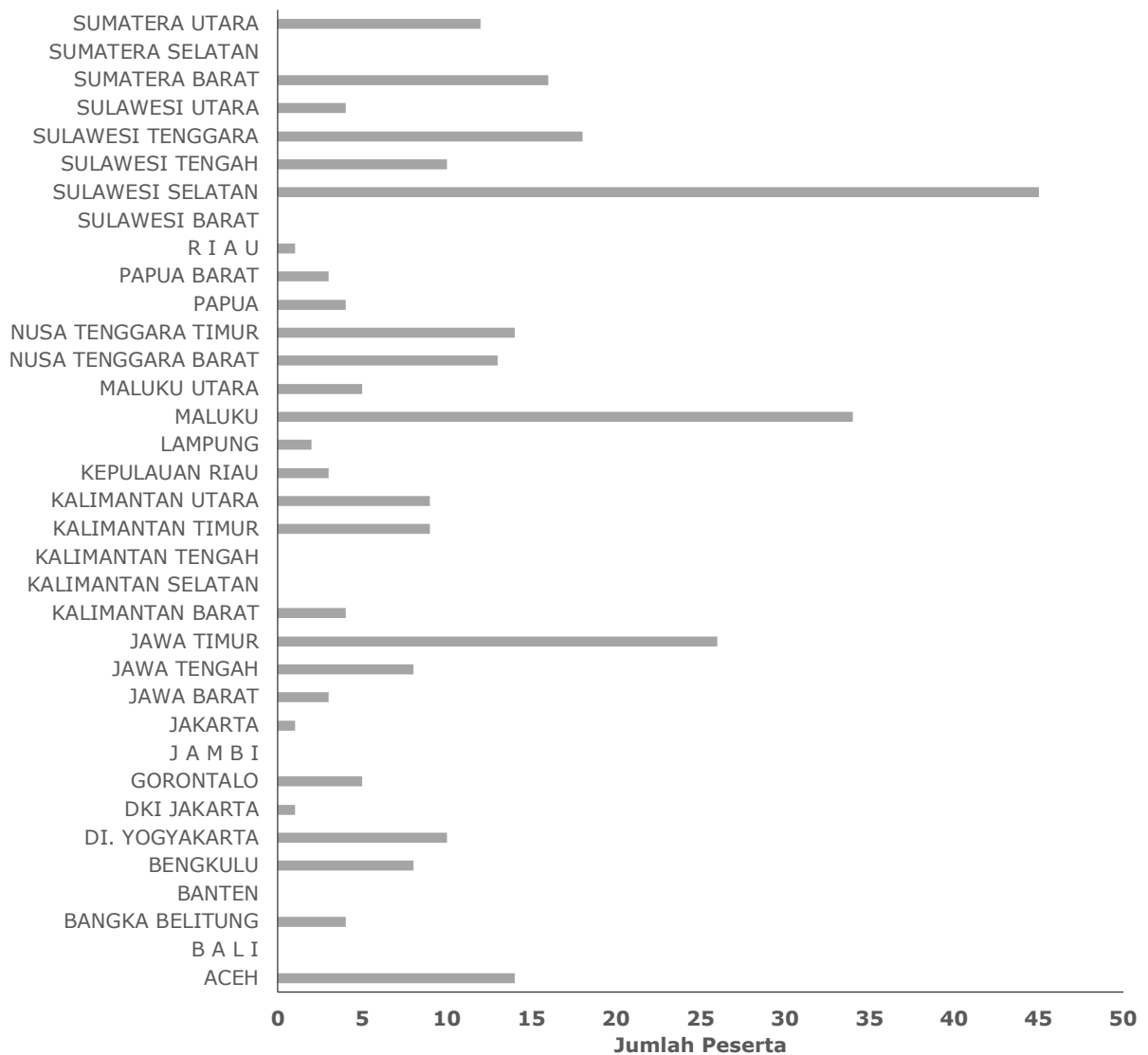
Pengembangan skema kompetensi keahlian bagi guru kejuruan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, dikonvensikan pada jenjang (level) empat jika mengacu pada penjenjangan KKNI. Jenjang kompetensi empat KKNI diperuntukkan bagi guru kejuruan merupakan batas minimal dengan asumsi di atas kompetensi peserta didik SMK (i.e. level dua dan tiga). Pengembangan skema kompetensi ke jenjang yang lebih tinggi (i.e. level lima, enam, tujuh, delapan, sembilan) dapat dilakukan dimasa mendatang jika program capaian lulusan pelatihan menunjukkan tren yang positif.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk sertifikasi keahlian guru-guru kejuruan dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awal Tahun 2017. LSP dibentuk dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui lembaga pelatihan dibawahnya (i.e. LPPPTK KPTK, PPPPTK). LSP yang berhak melaksanakan uji kompetensi keahlian guru kejuruan bidang keahlian kemaritiman adalah LSP LPPPTK KPTK. LSP LPPPTK KPTK dapat melaksanakan UKK terhadap peserta pelatihan LPPPTK KPTK (i.e. Program PKB, Keahlian Ganda, pelatihan berbasis kompetensi) untuk kompetensi keahlian dalam lingkup program kemaritiman (Putra, 2017). Sertifikasi kompetensi keahlian disini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas, menjaga eskistensi suatu profesi, daya saing, serta perlindungan hukum (Astuti, 2008; Rodin, 2015).

Putra (2017) menjelaskan bahwa LSP LPPPTK KPTK telah menyusun, mengajukan, dan mendapatkan lisensi penyelenggaraan UKK oleh BNSP (Nomor BNSP-LSP-660-ID), untuk skema kompetensi keahlian guru SMK level 4 pada keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap Ikan, Nautika Kapal Niaga, Teknik Kapal Niaga, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, Agribisnis Rumput Laut, dan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Skema kompetensi keahlian dibuat berdasarkan kemas KKNi dan kelompok kompetensi (klaster). Penyusunan skema berdasarkan kelompok kompetensi bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi (i.e. waktu, biaya) guru-guru kejuruan dalam mengikuti UKK yang diselenggarakan LSP LPPPTK KPTK. Selanjutnya, *output* UKK adalah daftar unit kompetensi dengan keterangan telah kompeten dan belum kompeten dalam dokumen resmi yang diterminologikan dengan istilah *skill passport*.



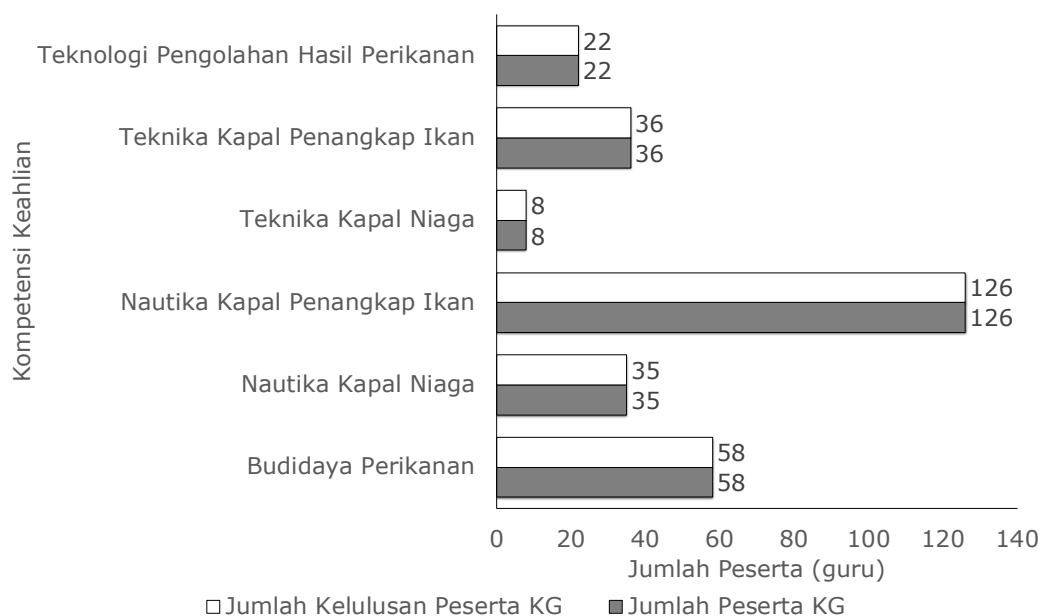
Gambar 3. Jalur pencapaian jenjang (level) kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNi) (Ditjen Belmawa, 2017).



Gambar 4. Sebaran peserta program keahlian ganda kemaritiman LPPPTK KPTK periode 2016/2017 (Sumber: LPPPTK KPTK, 2017).

Sasaran awal pelaksanaan uji kompetensi adalah peserta program keahlian ganda tahap 1 (Tahun 2016/2017), dimana total peserta yang terdaftar adalah sebanyak 15.000 peserta untuk seluruh bidang keahlian. Peserta program keahlian ganda bidang keahlian kemaritiman yang berhasil mengikuti proses pelatihan dan melakukan asesmen kompetensi (UKK) di LPPPTK KPTK adalah sebanyak 285 peserta yang berasal dari 28 provinsi di Indonesia (lihat Gambar 4). Kompetensi keahlian yang paling banyak diikuti adalah Nautika Kapal Penangkap Ikan yaitu sebanyak 126 peserta, dan kompetensi yang sedikit diminati adalah Teknik Kapal Niaga yaitu sebanyak 8 peserta (lihat Gambar 5). Sedangkan kompetensi keahlian lainnya berkisar antara 22 sampai 58 peserta.

Model pelaksanaan UKK adalah dengan langsung meng-asesmen peserta program keahlian ganda di pusat belajar sekaligus tempat uji kompetensi (TUK) setelah pembelajaran modul pelatihan diselesaikan. Selanjutnya, asesmen dilaksanakan sesuai dengan kluster skema yang telah disiapkan (satu kelompok kompetensi). Tingkat kelulusan asesmen kompetensi (UKK) pada bidang keahlian kemaritiman diperoleh rekomendasi kompeten sebesar 100%. Dimana, artinya adalah seluruh peserta program dinyatakan kompeten sesuai kluster uji kompetensi masing-masing yang diujikan oleh LSP LPPPTK KPTK.



Gambar 5. Data peserta program keahlian ganda bidang kemaritiman dan kelulusan UKK LSP LPPPTK KPTK. Hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP LPPPTK KPTK pada program keahlian ganda Tahun 2016/2017 adalah hanya pada 1 klaster uji dari setiap KKNI Level IV Guru Bidang Keahlian Kemaritiman (Sumber: LPPPTK KPTK, 2017).

Kesimpulan

Keberadaan IPT Kemendikbud dengan tugas dan fungsinya sebagai tempat pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru-guru bidang kemaritiman merupakan hal yang diperlukan dan akan berdampak signifikan dimasa mendatang. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2017 merupakan terobosan yang akan berpengaruh langsung terhadap standar kompetensi guru (SKG) khususnya guru kejuruan (*vocational teacher*) di SMK yang sebelumnya mengacu kepada SKG Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hasil UKK dengan rekomendasi kompeten sebanyak 100% pada peserta Program Keahlian Ganda merupakan awal yang baik, dengan catatan hanya untuk masing-masing satu klaster kompetensi. Para peserta yang nantinya dinyatakan kompeten untuk semua klaster (KKNI level 4) merupakan dampak langsung keberhasilan penerapan PKB dalam sistem peningkatan kompetensi guru SMK di Indonesia. Kajian ini belum dapat menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru SMK, namun sudah dapat memberikan deksripsi dan *insight* terhadap potensi yang dapat diperoleh dengan adanya pengembangan pelatihan berbasis kompetensi.

Ucapan Terimakasih

Penulis berterimakasih kepada Andi Rusdi, Yopi Sopian (LPPPTK KPTK), Helmy Akbar (Universitas Mulawarman), Yan Zakri (Akademi Maritim Pembangunan) atas diskusi dan masukannya pada penulisan awal manuskrip ini. Finalisasi manuskrip juga tidak mungkin diselesaikan tanpa informasi dan masukan dari Prof. Irwan, Dwi Bagus Fitriyanto, Janwar (LPPPTK KPTK), Davin HE Setiamarga (NIT-Wakayama College), Ari Anggoro (UniB). Terima kasih juga disampaikan kepada pihak LPPPTK KPTK atas izin penggunaan data dan publikasi. Ucapan yang sama juga disampaikan untuk editor dan pe-reviu mansukrip.

DAFTAR PUSTAKA

- [ANTA] Australian National Training Authority. 2003. What makes for good workplace learning? At a glance. Adelaide: NCVER.
- Andriani, D.E. 2010. Mengembangkan Profesionalitas Guru Abad 21 melalui Program Pembimbingan yang Efektif. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2): 78-92.
- Anita, D.E. 2016. Walisongo: Mengislamkan Tanah Jawa (Suatu Kajian Pustaka). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2): 243-266.

- Arifin, Z. 2012. Implementasi Manajemen Strategik Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Mutu SMK (Studi Pada SMK Kelompok Teknologi Bidang Otomotif di Kota Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(1):60-70.
- Astuti, B., 2008. Sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja wanita penata laksana rumah tangga (TKI/TKW PLRT). *Disertasi* tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dilemunthe, F.I., Sutadji, E., & Setianingsih, R.M. 2016. Pengembangan *soft skill* pada pendidikan kejuruan menunjang pengembangan karir siswa di dunia industri. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Malang 24 September 2016. Universitas Negeri Malang. Hal 745-761.
- [Ditjen. GTK] Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 2016. Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajaran. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [Dit. PSMK] Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. Kemendikbud merevitalisasi 219 SMK (42 SMK Pariwisata, 24 SMK Kemaritiman, 33 SMK Pertanian, 26 Industri Kreatif, dan 94 SMK bidang lainnya). Rubrik khusus. *Harian KOMPAS* 18 Agustus 2017. Hal 19.
- Dwijayanti, R., Marlina, N., Patrikha, F.D., Parjono. 2017. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Guru-guru SMK di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani* 1(2): 249-266.
- Habsy, B.A. 2017. Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2):90-100.
- Harlina, Y., Bachri, A.A. 2019. Pengaruh Motivasi, Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Guru SMKN 5 Banjarmasin. *Jurnal Wawasan Manajemen* 7(1): 99-112.
- Irnayah, E., Mukhadis, A., & Atmadji, T. 2016. Profesionalitas guru menjadi tuntutan dalam pengembangan SMK rujukan di era global. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Malang: 24 September 2016. Universitas Negeri Malang. Hal 737-744.
- Kartowagiran, B. 2011. Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi). *Cakrawala Pendidikan* XXX(3): 463-473.
- [LPPPTK KPTK] Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017. Sulawesi Selatan: LPPPTK KPTK.
- Maryati, T., Elmunsyah, H., & Sutadji, E. 2016. Pentingnya pengembangan profesionalitas guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK. *Seminar Nasional Pendidikan (SNP) 2016* : 58 – 67.
- Mohamad, M.M., Heong, M.Y., Kiong, T.T., & Rajuddin, M.R. 2012. Vocational pedagogy a dimension of vocational learning with workplace requirement. *Journal of Technical Education and Training*, 4(1): 23-30.
- Mufida, L., Widyarningsih, T.D., & Maligan, J.M. 2015. Prinsip Dasar Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Untuk Bayi 6–24 Bulan: Kajian Pustaka [In Press September 2015]. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 3(4): 1646-1651.
- Muharam, H. 1999. Dampak Pelepasan Batas Kepemilikan Asing Terhadap Terintegrasinya Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Internasional (Studi Literatur). *Jurnal Bisnis Strategi*, 4(1):1-7.
- Mulyawan, B., 2013. Pengaruh Pengalaman dalam Pelatihan terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional Guru. *Jurnal Media Komunikasi FIS*, 11(1): 45-65.
- Pawellangi, M.R., Widihiarso, W., Sonhadji, A., Purnomo, & Elmunsyah, H. 2016. Rasch model implementation in evaluating teacher competency test quality on multimedia program expertise. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(6): 04-09.
- Pawellangi, M.R. 2017. Pengembangan Model Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Berkelanjutan Berdasarkan Pemetaan Hasil Uji Kompetensi Guru Bidang Keahlian TIK Pada SMK. *Disertasi* tidak dipublikasikan. Jawa Timur: Universitas Negeri Malang.
- Peter, B. 2014. Competency-based training (CBT) in higher education: towards an implementation in Ghanaian polytechnics. *Tesis*. Groningen: University of Groningen.
- Robbinson, C., & Misko, J. 2003. *Extending learning opportunities: A study of cooperation between TAFE Institutes and schools and universities in Queensland [web edition]*. South Australia: NCVER.
- Rodin, R., 2015. Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas dan Eksistensi Pustakawan. *Jupiter*, 14(2): 45-55.
- Sabandi, A. 2013. Supervisi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesionalitas Guru Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(2):1-9.
- Sina, P.G. 2014. Peran Orangtua dalam Mendidik Keuangan pada Anak (Kajian Pustaka). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1):74-86.
- Slamet, P.H. 2011. Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala Pendidikan*, XXX(2): 189-203.
- Sudarya, Y. 2007. Service Quality Satisfaction dalam Layanan Pendidikan: Kajian Teoretis. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8:1-4.
- Sumarso. 2016. *Guru Pembelajar, upaya untuk meningkatkan kompetensi guru: Antara harapan dan tantangan masa depan*. Simposium GTK Tahun 2016. Banten: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Sutjipto. 2019. Perancangan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Sebagai Pranata Budaya Kerja. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1): 102-126.
- Ulfa, R.N. 2018. Pelatihan Guru SMK Muhammadiyah 4 Slipi Jakarta Mengenai Business Letter Berbahasa Inggris. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan* 2(1): 61-67.

- Wibowo, N. 2016. Upaya memperkecil kesenjangan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dengan tuntutan dunia industri. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 23(1): 45-59.
- Yoto. 2015. Pengembangan pendidikan kejuruan melalui pendidikan dan pelatihan bidang teknik mesin bagi guru SMK. *Jurnal Teknik Mesin*, 1: 88-101.
- <http://alihfungsi.gtk.kemdikbud.go.id> (diakses pada tanggal 6 Desember 2017).
- <http://bit.ly/LSPdanUIKK> (diakses pada tanggal 6 Desember 2017).
- <http://bsnp-indonesia.org/2017/10/26/uji-publik-rancangan-standar-kompetensi-guru-smkmak> (diakses 11 Januari 2018).
- <https://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/3-pilar-pengembangan-sdm-berbasis-kompetensi> (diakses pada tanggal 7 Desember 2017).